

ISBN No. 978-602-9367-05-8



# Prosiding Seminar Nasional

Hasil Penelitian Dosen Kopertis Wilayah V Yogyakarta



Bidang Ilmu Sosial

2011

Membangun Sinergi Perguruan Tinggi Swasta  
Kopertis Wilayah V Yogyakarta dengan  
Masyarakat Melalui Penelitian Dosen

Kementerian Pendidikan Nasional  
Kopertis Wilayah V  
Yogyakarta

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Sambutan Koordinator Kopertis Wilayah V .....	iii
Daftar Isi .....	iv
1. Program Pengembangan Masyarakat melalui Pengelolaan Credit Union (CU) di <i>Community Development</i> (CD) Bethesda Yogyakarta Oleh Agnes Erna Wantiyastuti	1
2. Konstruksi Yuridis Pengertian Kemanusiaan dan Komersial sebagai Dasar Legalisasi dalam Penyerahan Organ pada Proses Transplantasi Oleh Erna Tri Rusmala Ratnawati	13
3. Peluang Melestarikan Seni Pertunjukan Tradisi Wayang Golek Menak melalui Siaran TV Lokal di Yogyakarta Oleh Heri Setyawan .....	30
4. Pemberdayaan Kelompok Wanita Nelayan dalam Pengembangan Ekowisata Pantai Depok di Kabupaten Bantul Oleh Oktiva Anggraini .....	43
5. Perspektif <i>Gender</i> dalam Cerita Rakyat Jawa Oleh Siti Anafiah .....	58
6. Eksistensi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting yang Dialami Seseorang di Daerah Kabupaten Kulon Progo Oleh Sri Suwarni .....	77
7. Implementasi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Yogyakarta Oleh Sahudiyono .....	92
8. Efektifitas Komunikasi Petugas Penyuluhan Kesehatan dalam Meningkatkan Kesadaran Gaya Hidup Sehat Masyarakat Kota (Studi Kasus di Kecamatan Mergangsan Yogyakarta) Oleh Yenni Sri Utami.....	108

# **PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA NELAYAN MELALUI PNPM MANDIRI PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA PANTAI DEPOK DI KABUPATEN BANTUL**

**Oktiva Anggraini**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
FISIPOL Universitas Widaya Mataram Yogyakarta  
E-mail: [oktivabiyani@yahoo.co.id](mailto:oktivabiyani@yahoo.co.id)

## **ABSTRAK**

Terbatasnya aksesibilitas wanita nelayan terhadap informasi, kredit dan teknologi, mendorong kelompok wanita nelayan pantai Depok melakukan berbagai upaya dalam pemanfaatan potensi sumber daya pesisir. Penelitian dengan desain deskriptif kualitatif ini bermaksud untuk mengetahui serangkaian upaya strategis kelompok wanita nelayan dalam mengatasi keterbatasannya di samping kiprahnya untuk menunjang penataan ekowisata di Pantai Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui PNPM Mandiri Pariwisata cukup mampu merintis perluasan kesempatan kelompok wanita nelayan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan taraf hidup berkelanjutan dan menggali potensi setempat; terjadinya penguatan kelompok wanita nelayan baik formal maupun informal; adanya peningkatan kapasitas wanita nelayan yang mendukung pengembangan ekowisata melalui pelatihan diversifikasi produk & pengemasan produk olahan. Di samping itu, tersimpan potensi kelompok dalam perlindungan sosial wanita nelayan yang mendukung ekowisata.

Selain sebagai forum silaturahmi, tersimpan potensi ekonomi dari masing-masing lembaga ekonomi tersebut dan menjadi mesin penggerak aksi nyata yang mendukung penataan kawasan ekowisata dan mengurangi tindakan eksplotatif pesisir. Rekomendasi dari riset ini, perguliran dana & program pelatihan agar memperhatikan kebutuhan kelompok sasaran serta pelibatan peran kelompok wanita nelayan agar lebih ditingkatkan lagi dalam program pengembangan ekowisata.

Kata kunci: pemberdayaan; kelompok wanita nelayan; ekowisata.

## **PENDAHULUAN**

Wanita nelayan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan pesisir karena posisinya yang strategis dalam kegiatan berbasis perikanan dan kelautan sebagai pedagang pengecer, pengumpul ikan, pengelola jasa wisata, buruh upahan, maupun tenaga pengolah hasil perikanan. Sayangnya, dalam berbagai aspek kajian ataupun program-program pembangunan pesisir mereka tidak banyak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Dalam implementasi program-program penataan lingkungan atau kawasan, pemerintah kurang menjamin tegaknya hak perempuan atas pengelolaan lingkungan. Artinya kontribusi perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan dari perumusan dan pelaksanaan politik pengelolaan lingkungan yang berkeadilan, berkesetaraan dan berkemanusiaan kurang diperhitungkan.

Di Indonesia, pemberdayaan perempuan di bidang lingkungan pun menjadi isu yang populer sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberdayakan perempuan Indonesia. Salah satunya dengan kebijakan peningkatan produktifitas perekonomian perempuan. Dalam RPJMN 2004-2009 misalnya, menggariskan bahwa dengan kondisi umum status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinat dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki maka pemberdayaan ekonomi diarahkan untuk memperbaiki, membina, mengembangkan seluruh potensi ekonomi Nasional yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan. Dengan cara ini, tercermin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Pemenuhan ekonomi saat ini semakin dirasakan sebagai salah satu kebutuhan prioritas untuk mengantarkan kaum perempuan pada tataran perjuangan mewujudkan keadilan, kesetaraan gender untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga. Dengan difungsikannya hak ekonomi perempuan diharapkan pendapatan semakin meningkat, akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial keluarga yang selanjutnya akan mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan perencanaan tujuan pembangunan Milineum (MDG's).

Pemberdayaan dalam tulisan Darwin (2007:3) diartikan sebagai peningkatan kapasitas perseorangan atau kelompok untuk mempengaruhi pengembangan dan pilihan hidup dan mentransformasikan pilihan tersebut ke dalam tindakan yang diinginkan dan ke dalam hasil bagi pengembangan komunitas mereka. Termasuk di dalamnya adalah upaya untuk menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan serta kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan (Suharto, 2005: 58). Selain itu, strategi yang dapat ditempuh adalah dengan penguatan kelembagaan masyarakat; peningkatan kapasitas masyarakat hingga memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan (Darwin, 2007:3)

Pemberdayaan pada dasarnya adalah pemberian kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata, tapi juga kolektif (Hikmat, 2001: 46-48). Pengertian ini kurang lebih sama dengan pendapat Payne dan Shardlow mengenai tujuan pemberdayaan. Menurut Payne, tujuan utama

pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Sedangkan Shardlow menyimpulkan bahwa pemberdayaan menyangkut permasalahan bagaimana individu, kelompok ataupun masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Adi, 2002: 162-163). Selain itu, secara latah, kata pemberdayaan seringkali disampaikan dalam program-program pemerintah termasuk dalam program pemberdayaan perempuan. Senyatanya, program pemberdayaan tersebut masih jauh dari pelibatan aktif dari sosok perempuan karena lebih mengarah pada memobilisasi masyarakat dalam program pembangunan (Loekman Soetrisno, 1995:221). Efeknya, pemecahan masalah dalam jangka pendek terpenuhi akan tetapi untuk ke depannya menimbulkan ketergantungan obyek pembangunan karena mereka tidak turut menentukan hingga mengawasi, termasuk pelibatan aktif peran perempuan. Artinya, dalam pemberdayaan terkandung asumsi untuk memperbaiki posisi perempuan (Ratna Saptari, 1997). Beberapa intervensi pemerintah, tanpa disertai upaya untuk meningkatkan kekuasaan perempuan dalam melakukan negosiasi, tawar menawar dan untuk mengubah diri sendiri situasinya, tidak akan berhasil.

Demikian halnya ketika pemerintah menggemakan ekowisata di tanah air, usaha untuk menjamin keikutsertaan masyarakat setempat dan langkah-langkah yang perlu dicari agar masyarakat setempat dapat benar-benar terlibat dalam kegiatan ekowisata. Hal ini selaras dengan pendapat Yoeti (2008) bahwa ekowisata ibarat memiliki pisau bermata dua karena menyelaraskan antara kepentingan bisnis dengan misi konservasi sumber daya alam dan sosial, senyatanya menggambarkan betapa tingginya tingkat kesulitan manajemen ekowisata dalam jasa pelayanan. *Multiple-mission* yang diemban oleh pembangunan pariwisata di Indonesia ditunjukkan dengan misi pariwisata sebagai industri yang mampu menyediakan jasa layanan alam dan lingkungan (*supply of environmental service*) tanpa mengubah fungsi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lokal (*local needs*). Kedua, produk ekowisata sebagai jasa pelayanan dalam rangka menciptakan kepuasan wisatawan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, pemerintah mencanangkan PNPM Mandiri Pariwisata sejak tahun 2009 difokuskan pada pengembangan wilayah sasaran yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh dengan unsur daya tarik wisata (alam dan budaya) maupun fasilitas usaha pariwisata dan industri kreatif yang menjadi penggerak aktivitas kepariwisataan di suatu destinasi pariwisata. Ini dituangkan dalam tiga model yaitu, model klaster desa wisata, klaster daya tarik wisata dan model klaster usaha

pariwisata. Tahun 2009 dilaksanakan di 104 desa di 17 provinsi, dengan anggaran Rp.8,75 miliar dan salah satu penerimanya adalah kecamatan Kretek, Bantul Yogyakarta.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di desa wisata, telah diadakan integrasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata dengan PNPM Mandiri di berbagai sektor lainnya, di mana PNPM Mandiri Pariwisata menjadi lokomotifnya. Antara lain, dengan Kementerian PU melalui PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP), Kementerian Dalam Negeri dengan PNPM Mandiri Perdesaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PNPMuKP Kementerian Pertanian dengan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) maupun Kementerian Koperasi dan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). ([http://pnpm-mandiri.org/index.php?option=com\\_c](http://pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_c)).

Lima tahun terakhir, di lokasi penelitian, pantai Depok Bantul tengah dikembangkan menjadi wisata kuliner dengan potensi pendukung lainnya. Menjadi tantangan baru kiranya untuk menyulap kawasan tersebut berikut potensi sumber daya manusianya agar siap dengan limpahan kunjungan wisata. Berangkat dari latar belakang tersebut, menarik untuk diteliti pemberdayaan wanita nelayan melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Pariwisata dalam penataan ekowisata di pantai Depok Bantul.

## METODE PENELITIAN

Dengan desain kualitatif deskriptif, penelitian ini mengambil studi kasus di pantai Depok Kabupaten Bantul Yogyakarta bulan Juli-September tahun 2010. Dipilihnya lokasi riset tersebut dengan pertimbangan potensi wanita nelayan cukup dominan, telah terbentuk organisasi kelompok wanita nelayan dan merupakan daerah pemberdayaan wanita nelayan terbaik versi pemda Kabupaten Bantul. Pengumpulan data primer melalui wawancara terstruktur dan pengamatan langsung. Penentuan key informan secara *purposive sampling* atau sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu, yaitu pelaku usaha di sentra kegiatan wanita nelayan, pengolah ikan, pedagang ikan dan pedagang asongan, di samping informan kunci yakni dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, koperasi TPI Depok dan kelompok usaha bersama Wanita Nelayan Depok. Pengumpulan data sekunder melalui penelusuran arsip dan dokumen yang terkait. Teknik triangulasi data digunakan untuk mengecek reabilitas dan validitas data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dusun Depok yang menjadi lokasi penelitian merupakan satu dari 11 (sebelas) pedukuhan yang terletak di desa Parangtritis, kabupaten Bantul. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah melalui upaya mengoptimalkan potensi pesisir. Semula, masyarakat pesisir pantai Depok berprofesi sebagai bertani dan beternak itik. Seiring dengan peningkatan arus wisatawan menuju pantai Depok, masyarakat setempat mulai tertarik menekuni profesi sebagai nelayan. Walaupun telah menjadi nelayan, mereka tetap menggeluti dunia pertanian dan peternakan sehingga mata pencaharian mereka dikenal dengan nama Tani Nelayan. Pada tahun 1997, masyarakat pesisir Depok telah mendatangkan nelayan dari Gombong dan Cilacap untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang ingin menjadi nelayan. Keseriusan ini seiring dengan kesadaran untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Masyarakat yang menjadi nelayan pun belum sepenuhnya melepaskan diri dari aktivitas bertani. Lahan pertanian meliputi sawah dan ladang seluas 2.760.775, rata-rata ditanami bawang merah, cabai dan sayur-sayuran dengan mengandalkan irigasi tadah hujan. Minimnya sarana dan prasarana penangkapan ikan dan masa panen tidak sepanjang tahun, menjadikan profesi petani tetap ditekuni. Terutama di musim paceklik seperti bulan Juni hingga Agustus.

Dalam aktifitas rumah tangga, wanita nelayan selain mengalokasikan waktu untuk kegiatan domestik, mereka meluangkan waktu untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan hasil tangkap ikan. Setelah nelayan datang dari melaut, wanita nelayan membantu penjualannya ke pasar ikan. Pada saat paceklik, wanita nelayan pantai Depok mendapatkan pasokan ikan dari daerah pantai Utara, Pacitan dan Cilacap sehingga kegiatan perdagangan ikan tetap berjalan. Pada saat paceklik, suami mereka tidak melaut karena gelombang dan angin yang besar tidak memungkinkan mereka untuk melaut. Usaha subsisten wanita nelayan, terutama pada saat paceklik dapat menjadi sandaran utama bagi keluarga nelayan. Ketika musim paceklik tiba, tidak sedikit nelayan yang harus berhutang pada juragan, kios, atau kerabat yang dianggap mampu. Mereka mulai menjual perhiasan, mengambil tabungan atau menjual hasil ternak dan pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Melalui penelitian ini, peneliti mengkaji upaya yang ditempuh kelompok wanita nelayan dalam pengembangan ekowisata pantai Depok di kabupaten Bantul dengan keterbatasan aksesibilitas wanita nelayan terhadap informasi dan kredit mikro pemerintah, dengan indikator berikut: Perluasan kesempatan kelompok wanita nelayan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan taraf hidup berkelanjutan; pemberdayaan kelembagaan

masyarakat dalam pengembangan ekowisata; peningkatan kapasitas wanita nelayan yang mendukung pengembangan ekowisata dan perlindungan sosial kelompok wanita nelayan dalam pengembangan ekowisata.

#### **Perluasan kesempatan kelompok wanita nelayan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan taraf hidup berkelanjutan.**

Berdasarkan penelitian hasil observasi dan wawancara di lapangan, kegiatan pemberdayaan wanita nelayan melalui PNPM Mandiri Pariwisata meliputi kegiatan penguatan individu dan pranata-pranata masyarakat, termasuk di dalamnya adalah menanamkan nilai-nilai budaya kerja keras, hemat, keterbukaan, sikap bertanggung jawab, pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasinya dalam pembangunan pesisir yang melibatkan peran wanita nelayan. Dari sisi ekonomi, pemberdayaan dapat diterjemahkan sebagai upaya peningkatan usaha-usaha yang dikelola wanita nelayan yang muaranya adalah pengembangan pembangunan pesisir yang berkelanjutan. Termasuk di dalam hal ini, adanya diversifikasi usaha dan pola pembagian kelompok.

Selama ini upaya diversifikasi usaha telah dilakukan. Semula, mereka hanya berkulat atau berbasis penjualan ikan dengan budi dayanya. Pada gilirannya mulai bergerak di sektor usaha jasa wisata seperti asongan (baju, makanan minuman kemasan dan cinderamata), bisnis *voucher* dan peralatan wisata lainnya. Hal ini seiring dengan meningkatnya arus wisatawan yang masuk di wilayah Depok dan sekitarnya. Selain mengunjungi Depok, biasanya wisatawan berminat mendatangi destinasi wisata lain di sekitarnya bahkan ada yang tertarik untuk tinggal dalam waktu tertentu menikmati ekowisata setempat.

Melalui PNPM Mandiri Pariwisata ini, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul bermaksud memberi peran yang lebih pada para wanita nelayan khususnya di kecamatan Kretek untuk lebih terlibat dalam penataan ekowisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan tabel 1 nampak bentuk-bentuk pelatihan yang telah dilakukan di kecamatan Kretek. Pelatihan yang melibatkan dua puluh orang pengolah ikan dan tokoh masyarakat tersebut, diikuti dengan antusias mengingat ketrampilan yang diajarkan menunjang kebutuhan mereka dalam melayani wisatawan; pengelolaan rumah makan dan sanitasinya serta manajemen berwirausaha. Pelatihan diikuti dengan kegiatan produktif lainnya yakni *launching* produk kuliner yang dimaksudkan mengenalkan potensi unggulan kuliner setempat dan pembukaan kios yang dikelola KUB Mina Bahari 45. Mata rantai pemasaran dalam program ini dikenalkan kepada pemanfaat program sehingga pada gilirannya kemudian masyarakat dapat memeliharanya melalui kelompok-kelompok yang telah

terbentuk yakni KUB Mina Bahari 45 dan Kelompok Pasir Rejeki yang bertugas memelihara fasilitas persewaan Motor Pasir dan kios.

Ditinjau dari materi pelatihan, cukup aplikatif untuk diterapkan wanita nelayan dan menunjang upaya diversifikasi yang tengah dilakukan. Setelah pelatihan, hasil pengamatan menunjukkan minat wisatawan untuk membeli makanan olahan hasil pelatihan tersebut belum sesuai harapan para penjual. Artinya, produk olahan tersebut masih sulit diterima pasar karena persoalan selera, kemasan dan sanitasi.

Tabel 1. Bentuk Kegiatan dan Sumber Pendanaan PNPB MANDIRI PARIWISATA di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul

No.	Jenis Kegiatan	Peserta	Lokasi	Dana PNPB Mandiri Pariwisata	Dana Swadaya
1.	Pelatihan Produk Kuliner Unggulan	20 orang	TPI Depok	29.687.500	645.500
2.	Pembangunan Kios KUB	20 orang	Pantai Depok		
3.	Launching Produk Kuliner	20 orang	Depok		
4.	Pembentukan Kelompok pemanfaat dan Pemeliharaan "Pasir Rejeki"	7 orang	Pantai Depok	-	
5.	Bea Operasional PNPB Mandiri Pariwisata	5 orang	Kecamatan Kretek	3.125.000	
6.	Persewaan fasilitas wisata (Motor Pasir)		Pantai Depok	29.687.500	

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2010.

Persoalan lain di balik program PNPB Mandiri Pariwisata tersebut, meskipun telah berupaya melakukan diversifikasi usaha bersama keluarga, permodalan usaha tetap menjadi batu sandungan bagi pengembangan usahanya. Sandaran wanita nelayan antara lain menggantungkan diri pada kelompok wanita nelayan, koperasi TPI atau tengkulak/rentenir. Modal yang terbatas akan menyulitkan pengembangan usaha yang besar. Apalagi di musim-musim ramai pelancong wisata, Sabtu dan Minggu, mereka membutuhkan modal yang lebih besar karena pengunjung banyak berdatangan membutuhkan santapan kuliner khas pesisir. Sedangkan di sisi lain, harga mentah ikan pun sudah cukup tinggi, sebagai gambaran 1 kg udang laut mencapai 49 ribu rupiah sedang lobster dapat mencapai ratusan ribu rupiah. Solusi terdekatnya, wanita nelayan akhirnya meminjam pada tengkulak. Bila permodalan lebih besar, solusi terakhir ini bisa ditekan.

Hal tersebut, peneliti konfirmasi kepada petugas Mitra Desa dan PPL Perikanan. Menurut mereka, bila permodalan diperbesar, ada ketakutan dari penyelenggara program,

dana stimulan diselewengkan untuk pembelian barang-barang konsumtif dan bukan modal usaha. Dengan pengalaman itu maka dana stimulan tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil agar program pemberdayaan terlaksana dengan baik. Melalui Program PNPM Mandiri Pariwisata sebagaimana tampak dalam tabel 1, telah berhasil mengumpulkan dana swadaya masyarakat sebesar Rp. 645.500,- untuk menunjang kegiatan. Sekalipun kecil dari sisi jumlah, ini menepis anggapan bahwa program ini hanya menggulirkan dana tanpa berupaya mengakumulasikan modal swadaya dari masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan harapan wanita nelayan agar jumlah perolehan dana stimulan dapat lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Demikian pula dengan distribusinya agar tidak terjadi pembagian stimulan yang tidak tepat sarannya. Akan tetapi meski dana bergulir dari DKP, PEMP, PNPM Mandiri jumlahnya relatif sedikit mampu menciptakan wirausaha-wirausaha baru. Masyarakat lokal tak lagi menjadi obyek pelaksana atau proyek-proyek penataan wisata dari pemerintah. Bermodal partisipasi yang cukup baik dari masyarakatnya, penataan wisata pantai Depok lambat laun menjadi lebih baik. Secara kuantitas, setelah berlangsung program pemberdayaan (yang diprakarsai pemerintah maupun perguruan tinggi) kurang lebih tiga tahun dalam pengamatan peneliti, pola usaha wanita nelayan Depok mulai berubah, yang semula hanya membantu menjualkan ikan berubah menjadi pengelola kedai ikan. Jumlah penjual ikan yang semula hanya bekisar 30 orang, kini menjadi lebih dari 80 orang. Pendapatan mereka pun bertambah, semula 20 ribu rupiah per hari, sekarang dapat mencapai 140 ribu rupiah lebih per hari. Stimulan yang diberikan pemerintah secara bergulir meski jumlahnya relatif kecil, cukup membantu bagi wanita nelayan yang semula tidak memiliki usaha, akhirnya dapat membuka usaha karena perguliran dana stimulan (Wawancara dengan bu Nunik Ketua Kelompok Wanita Nelayan Agustus, 2010). Akan tetapi, sebagian wanita nelayan juga masih memiliki sikap boros dan konsumtif sehingga kesulitan permodalan sering mereka alami pada saat musim paceklik atau saat harus membayar keperluan sekolah. Di sinilah pentingnya, kesadaran menabung yang harus ditanamkan kepada anggota kelompok agar saat paceklik tiba dan musim pembiayaan sekolah, mereka dapat mengatasi kesulitan ekonominya, tidak terikat kepada rentenir.

#### **Pemberdayaan kelompok wanita nelayan dalam pengembangan ekowisata.**

Penguatan kelompok wanita nelayan dalam mendukung kegiatan ekowisata dapat ditilik dari meningkatnya aktifitas organisasi lokal tersebut di level PKK dan Kelompok Sadar Wisata, kelompok Pengolah Ikan (Kedai Ikan) & Kelompok Penjual Ikan. Selain berfungsi sebagai sarana silaturahmi, kelompok ini dapat menjadi sumber permodalan

untuk meminimalisir kedekatan wanita nelayan dengan para tengkulak serta corong perluasan informasi pemerintah.

Melalui kelompok-kelompok formal dan informal inilah, pemuka masyarakat, pemerintah dan instansi terkait menyampaikan informasi tentang penataan lingkungan pesisir. Kesadaran wanita nelayan untuk berorganisasi dalam bentuk organisasi informal maupun formal sudah terbentuk dengan cukup baik. Kelompok-kelompok formal atau bentukan dari pemerintah meliputi kelompok sadar Wisata dan PKK. Sedangkan kelompok-kelompok informal berujud kelompok-kelompok pengajian dan arisan rutin per dukuh. Mengingat dasar dan proses pembentukan kelompok berbeda maka keterikatan wanita nelayan dalam masing-masing kelompok terhadap organisasi relatif berbeda bergantung pada motivasi mereka berafiliasi. Motivasi ekonomi menjadi salah satu motif pendorong para wanita nelayan aktif dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, kelompok PKK dan pengajian lebih banyak dibanjiri anggotanya dalam tiap pertemuan dibanding kelompok sadar wisata yang tidak mengadakan arisan simpan pinjam. Demikian pula, arisan ibu-ibu rutin dasa wisma lainnya lebih diminati karena perputaran uang yang mudah diperoleh untuk menyangga kekurangan mereka tiap bulannya, terutama saat musim paceklik.

Sebelum dicanangkan PNPM Mandiri Pariwisata, kegiatan organisasi wanita nelayan sudah ada, sebagian di antaranya aktif dan sebagian lagi pertemuan diadakan insidentil sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya program lanjutan dari PEMP tersebut, kegiatan pokdarwis yang semula pasif, menjadi lebih aktif lagi mengingat selain perguliran dana, PNPM Mandiri Pariwisata memberikan bantuan operasional pokdarwis dan pengadaan motor ATV/motor pasir. Di samping itu, forum-forum semacam ini bermanfaat untuk menyusun kesepakatan dan norma yang menjadi pegangan mereka seperti: kewajiban menyerahkan sebagian keuntungan Kelompok Usaha Bersama Wanita Nelayan ke Koperasi TPI Depok; pengelolaan fasilitas tempat ibadah secara bergiliran dan mencegah berkembangnya prostitusi di pantai Depok. Aksi nyata pun bisa digerakkan melalui forum-forum yang diadakan rutin setiap bulannya atau waktu-waktu tertentu yang antara lain membahas: bersih desa, bersih pantai, penataan tenda kedai ikan, pembangunan pusat oleh-oleh dan prasarana pariwisata serta pengelolaan tempat ibadah (Wawancara dengan pemuka Masyarakat, T, Agustus 2010).

Sebagaimana dipaparkan dalam pendahuluan bahwa pengembangan suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil bila secara optimal didasarkan pada salah satu aspeknya yakni upaya peningkatan keterpaduan dan *unity* pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zone pengembangannya. Apabila ditautkan dengan fenomena di lokasi

penelitian, keterpaduan masyarakat lokal dan pemerintah setempat, tengah dan selalu dilakukan agar tercipta pengembangan ekowisata yang lebih baik.

Ditinjau dari sisi perencanaan pengembangan ekowisata, pelibatan kelompok wanita nelayan dikategorikan masih sebatas sebagai bagian dari mobilisasi dukungan wanita nelayan pada program pemberdayaan yang diprakarsai pemerintah. Dengan beralih minimnya pengetahuan dan ketrampilan wanita nelayan maka program pemberdayaan lebih banyak menyentuh personel pengurus saja atau kelompok wanita nelayan yang sudah cukup maju usahanya. Sedangkan kelompok wanita nelayan yang masih membutuhkan suntikan modal justru seringkali tidak mendapatkan bantuan maupun pelatihan. Ditilik dari penguatan lembaga, hal ini kurang menguntungkan karena solusi jangka pendek berupa keterbatasan modal mungkin teratasi akan tetapi kesinambungan kelompok dan program pemberdayaan patut dipertanyakan. Minimnya pelibatan wanita nelayan pada perencanaan pengembangan ekowisata berdampak pada rendahnya peran mereka dalam proses evaluasi dan monitoring. Forum-forum wanita nelayan masih berkutat pada pembahasan kepentingan usaha mereka.

#### **Peningkatan kapasitas kelompok wanita nelayan yang mendukung pengembangan ekowisata.**

Melalui beragam program pemberdayaan masyarakat nelayan yang diselenggarakan pemerintah, LSM maupun perguruan tinggi, tingkat pemahaman wanita nelayan Depok terhadap pengembangan ekowisata diupayakan meningkat. Program pemberdayaan kelompok wanita nelayan pada umumnya berujud peningkatan ketrampilan pasca panen (pengolahan ikan), penataan menu kedai ikan & sanitasinya serta ketrampilan berwirausaha. Keterbatasan anggaran, minimnya monitoring dan evaluasi program mengakibatkan kepesertaan program cenderung baru dimanfaatkan personel pengurus kelompok wanita nelayan atau tokoh masyarakat setempat. Berdasarkan wawancara dengan wanita nelayan, hal itu sering terjadi karena anggota yang lain merasa kurang mampu mengikuti pelatihan dengan alasan kegiatan domestiknya (wawancara dengan sejumlah wanita nelayan, Agustus 2010).

Berdasarkan tabel 2, nampak bahwa pelatihan yang dimotori Dinas Kebudayaan & Pariwisata kabupaten Bantul ini berupaya menambah wawasan wanita nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Bahari 45 di kecamatan Kretek yang muaranya menyejahterakan masyarakat pesisir. Ditilik dari materi yang diberikan cukup aplikatif dan diikuti dengan antusias oleh para wanita nelayan selama tiga hari, tanggal 27-29 September 2010. Acara ini diawali dengan sosialisasi di tingkat kecamatan,

diikuti dengan pembentukan kelompok atau KUB penerima manfaat. Selanjutnya KUB tersebut mengajukan proposal kegiatan dan setelah mendapat persetujuan Musyawarah di tingkat di dusun, barulah kegiatan yang tepat sasaran dilaksanakan dengan melibatkan mitra pengawas dari STUPA Yogyakarta. Persoalan yang dikeluhkan peserta adalah minat pasar kurang terhadap produk baru hasil olahan dan terbatasnya bahan baku yang menunjang proses produksi (wawancara dengan K, staf Promosi Pariwisata Dikbudpar kabupaten Bantul dan pelaku usaha ibu R, September 2010).

TABEL 2.  
Pelatihan PNPM Mandiri Pariwisata Wanita Nelayan di kecamatan Kretek,  
kabupaten Bantul Yogyakarta

No.	Materi	Waktu	Peserta
1.	Pengenalan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Pariwisata	2 jam	20 orang
2.	Peningkatan peran perempuan dalam penanggulangan kemiskinan di desa wisata Parangtritis	2 jam	20 orang
3.	Manajemen kewirausahaan dan prospek usaha kuliner di TPI Depok	2 jam	20 orang
4.	Peran Koperasi dalam pengembangan usaha kuliner	2 jam	20 orang
5.	Pengenalan aneka produk olahan kuliner (abon, steak hiu, crispy udang, presto)	2 jam	20 orang
6.	Pengemasan dan pemasaran	2 jam	20 orang
7.	Praktek pengolahan aneka produk olahan kuliner (abon, steak hiu, crispy udang, presto)	3 jam	20 orang
8.	Pelatihan Pengemasan	1 jam	20 orang

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Bantul, 2010.

Seperti halnya program pemberdayaan di berbagai tempat yang membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan output yang diinginkan, program-program tersebut menurut peneliti perlu diimbangi dengan monitoring berkelanjutan. Dengan demikian akan meminimalkan tindakan-tindakan ceroboh wanita nelayan dalam pemanfaatan potensi pesisir. Sebagai contoh kecil: penggunaan formalin untuk pengawetan; penyajian ikan olahan yang sudah tidak fresh dan pembuangan limbah sembarangan. Dengan ketatnya monitoring, diharapkan kasus-kasus tersebut lambat laun berkurang. Pengamatan peneliti menunjukkan cukup banyak pemilik warung kuliner yang telah menjaga tatanan menu dan kebersihan penyajian makanan, adanya makanan pendamping, sanitasi dan pengawetan ikan yang memadai (dikelola kelompok), partisipasi aktif wanita nelayan dalam menjaga kebersihan warung dan sekitarnya. Bahkan, muncul kesadaran wanita nelayan akan pengelolaan limbah ikan. Berdasarkan wawancara dengan para pengurus kelompok wanita

nelayan, mereka telah berupaya dua kali mengajukan proposal untuk pengelolaan limbah namun hingga penelitian ini selesai belum mendapatkan tanggapan dari instansi terkait.

Selain yang bersifat penataan fisik, pemahaman wanita nelayan terhadap konsep penataan ekowisata juga diwujudkan dalam aksi-aksi nyata yang artinya telah berlangsung kegiatan rutin dalam menunjang pencitraan wisata Depok. Di antaranya yang menonjol adalah keterlibatan wanita nelayan pada kegiatan Tradisi Masyarakat: "Sedekah Laut", suatu tradisi yang menjadi ikon wisata di daerah Depok setiap bulan "Syura". Sedekah laut lebih menjadi media berinteraksi untuk membangun solidaritas sekaligus membangun kebersamaan memenuhi kepentingan wisata. Upacara yang melibatkan peran wanita nelayan ini membentuk struktur sosial baru. Nilai-nilai lama bersentuhan dengan nilai-nilai baru. Tradisi lama nampak pada sesaji. Unsur modern terlihat dari penampilan penari, penyaji dari sedekah laut dan pertunjukan kesenian yang dipertontonkan kepada publik telah mengalami perubahan konsep. Pengemasan informasi di media massa maupun direktori asing melalui Dinas Kebudayaan & Pariwisata setempat juga menunjukkan bahwa tradisi ini menjadi ikon *culture* dan sekaligus menjadi agenda pariwisata nasional. Keuntungan seperti ini seharusnya diimbangi dengan upaya menggali kesenian-kesenian daerah setempat agar dapat diangkat sebagai suguhan wisatawan yang menarik.

#### **Perlindungan sosial kelompok wanita nelayan dalam pengembangan ekowisata.**

Perlindungan sosial yang dimaksudkan di sini adalah strategi kelompok wanita nelayan dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan, miskin dan masyarakat miskin yang disebabkan karena bencana alam dan dampak krisis ekonomi. Kelompok-kelompok wanita nelayan baik yang sifatnya formal maupun informal memandang pentingnya menjalin tali silaturahmi sesama warga. Selain motif ekonomi, motif dan kebutuhan sebagai makhluk sosial yakni menjalin silaturahmi, menjadi dasar para wanita nelayan tertarik dalam berorganisasi. Kesibukan sebagai petani, buruh tani dan rumah tangga lainnya menyulitkan mereka berinteraksi dengan para tetangga. Melalui forum-forum arisan inilah mereka saling menjalin tali silaturahmi sehingga tercipta kohesi sosial yang cukup tinggi.

Masyarakat pesisir yang masih *guyub*, diwarnai dengan adanya modal sosial yang cukup tinggi ini, akan memudahkan terjadinya perubahan-perubahan sosial yang diinginkan bersama khususnya bagi kemajuan perekonomian mereka. Kohesi sosial tersebut dapat menjadi lem perekat dalam pemecahan masalah bila terjadi musibah, seperti gempa bumi melanda Yogyakarta tahun 2006. Pemecahan persoalan warga, terutama wanita nelayan dilakukan dengan cara musyawarah baik dalam perbaikan rumah yang

terkena bencana maupun pembagian jatah bantuan-bantuan dari donatur melibatkan kelompok wanita nelayan. Melalui forum tersebut, semangat untuk bangkit kembali dari keterpurukan seringkali disampaikan para aparat pemerintah terkait. KUB yang dibentuk melalui PNPM Mandiri Pariwisata dengan perguliran dana bagi anggotanya, dilengkapi mekanisme untuk menyisihkan sebagian keuntungannya bagi kepentingan sosial. Keuntungan tersebut tidak hanya dinikmati anggota namun juga dinikmati non anggota.

Persewaan motor ATV diharapkan mampu menambah minat dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke pantai Depok di samping menciptakan diversifikasi usaha yang dikelola kelompok pengusaha motor ATV. Kaitannya dengan hal ini, tokoh-tokoh masyarakat dan ulama setempat menyambut baik pemanfaatan motor wisata dalam menunjang penataan ekowisata tersebut. Ide-ide pengembangan mereka gayung bersambut dengan aspirasi warga setempat untuk penataan ekowisata yang lebih baik. Aspirasi warga tersebut berujud material dan non material manfaatnya dirasakan warga seperti pembangunan fasilitas ibadah, kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang ditopang iuran warga.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Ditilik dari proses pemberdayaan kelompok wanita nelayan dalam pengembangan ekowisata di pantai Depok melalui PNPM Mandiri Pariwisata Kabupaten Bantul, telah cukup mampu merintis perluasan kesempatan kelompok wanita nelayan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan taraf hidup berkelanjutan dan menggali potensi setempat; terjadinya penguatan kelompok wanita nelayan baik formal maupun informal; adanya peningkatan kapasitas wanita nelayan yang mendukung pengembangan ekowisata melalui pelatihan diversifikasi produk & pengemasan produk olahan dan kemampuan dalam perlindungan sosial kelompok wanita nelayan yang mendukung ekowisata. Temuan masalah yang masih harus ditindaklanjuti adalah kontinuitas program pemberdayaan wanita nelayan yang mengantarkan mereka menjadi perencana, pelaku aktif dan pengawas langsung dari kegiatan pemberdayaan.

### **2. Saran:**

- Proses pemberdayaan ekonomi melalui PNPM Mandiri Pariwisata hendaknya diikuti penguatan lembaga lokal yang ada yang memberi ruang partisipasi yang lebih luas bagi

wanita nelayan sehingga proses peningkatan kapasitas pun lebih banyak dinikmati anggota atau wanita nelayan non anggota yang memang lebih membutuhkan.

- Upaya pemberdayaan kelompok wanita nelayan hendaknya berkesinambungan utamanya dalam usaha meningkatkan pemahamannya terhadap pemanfaatan potensi pesisir secara bijak dengan cara menjaga kelestarian, keseimbangan alam dan lingkungan hidup. Lebih khususnya, materi pelatihan yang diberikan dalam PNPM Mandiri Pariwisata lebih mengacu pada kebutuhan wanita nelayan, segmentasi serta selera pasar dan ketersediaan bahan olahan.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan andil berupa dana, pemikiran, masukan terhadap penelitian ini, yakni :

1. Koordinator Kopertis Wilayah V atas bantuan dananya melalui DIPA Kopertis Tahun anggaran 2010 dan fasilitas untuk menerbitkan dalam bentuk proceeding.
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bantul, staf pelaksanaanya dan segenap informannya.
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Bantul, staf pelaksanaanya dan segenap informannya.
4. Ketua TPI Depok, Ketua dan pengurus KUB Mina Bahari 45.
5. Ibu Dr. Sari Murti M.Hum. yang telah berkenan memberi saran dan kritikan atas karya ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darwin Muhadjir, 2007, Peran CSR dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Modul Pelatihan* disampaikan dalam Pelatihan CSR yang diselenggarakan MSK UGM dengan PT. Pupuk Kalitim, 16-20 Juli 2007.
- Harry Hikmat, 2001, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Isbandi Rukminto Adi, 2002, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Lindberg. K., 1991, *Policies for Maximizing Nature Tourism Ecological and Economic Benefit*, World Resources Institute.

Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung.

Soetrisno, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.

Saptari, Ratna, 1997, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta.

**Internet:**

([http://pnpm-mandiri.org/index.php?option=com\\_c](http://pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_c)) diakses 3 Agustus 2010.